

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Tunjangan Pegawai DKI Meluruh Separuh

Pegawai yang bertugas menangani Covid-19 tetap mendapat tunjangan penuh.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) aparat sipil negara sebesar 25 persen. Kebijakan itu ditempuh untuk menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Chaidir menerangkan seharusnya aparat sipil menerima tunjangan kinerja sebesar 75 persen. Namun pemerintah DKI saat ini hanya sanggup membayarkan setengahnya. "Yang 25 persen pembayarannya ditunda dan akan dibayarkan ketika APBD stabil," ujar dia, kemarin.

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya menyatakan APBD Jakarta 2020 mengalami penurunan hingga 53 persen akibat wabah Covid-19. Walhasil, pemerintah harus mengurangi belanja langsung dan belanja tidak langsung—termasuk belanja pegawai atau TKD—agar anggaran daerah tidak defisit.

Tim anggaran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta kemudian sepakat untuk mengurangi dana anggaran yang semula diproyeksikan sebesar Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun. Pengurangan TKD ini bisa menghemat dana hingga Rp 4,38 triliun.

Chaidir menjelaskan tidak semua amtenar mengalami pengurangan tunjangan kinerja. Aparat yang bertugas menghadapi Covid-19 tetap menerima tunjangan secara penuh.

Contohnya adalah tenaga kesehatan, pegawai negeri pendukung tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas, anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah, petugas pemulasaraan jenazah, hingga pengolah data epidemiologi wabah *corona* dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. "Mereka yang mendapat pengecualian (tetap mendapatkan TKD penuh)," tutur dia.

Chaidir tak menyanggah kabar bahwa ada sebagian organisasi perangkat daerah yang mengajukan permohonan agar tunjangan kinerjanya tidak dipotong. Namun aparat yang tetap mendapatkan TKD penuh hanyalah pegawai yang bertugas menangani Covid-19.

Pegawai negeri dari organisasi perangkat daerah yang tidak menangani Covid-19, kata Chaidir, juga bisa mendapatkan tunjangan kinerja penuh. Asalkan, aparat itu benar-benar bertugas atau diperbantukan menghadapi *corona* dan telah mendapatkan persetujuan dari gubernur.

Untuk meringankan beban pegawai akibat pengurangan tunjangan kinerja, kata Chaidir, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah telah menyurati Bank DKI agar menunda angsuran pinjaman bagi aparat pemerintah DKI. Surat itu dikirimkan pada 29 April lalu. "Mereka (Bank DKI) akan memberikan relaksasi," tutur dia.

Sumber *Tempo* di Balai

Kota mempertanyakan kebijakan pengurangan tunjangan kinerja bagi sebagian aparat itu. Sebab, saat pemotongan itu dilakukan, peraturan gubernur tentang besaran TKD itu belum terbit. Padahal, pemerintah DKI mulai mengurangi pembayaran tunjangan pada bulan ini. "Kalau pemotongan TKD ini belum ada dasar hukumnya, bisa maladministrasi," kata sumber itu.

Chaidir mengklaim peraturan gubernur mengenai penyesuaian besaran tunjangan kinerja tersebut sudah terbit sebelum pengurangan diterapkan. "Pergubnya sudah ada," tutur dia.

Lewat situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pemerintah DKI, *Tempo* mencoba menelusuri peraturan gubernur mengenai penyesuaian besaran TKD itu. Namun hingga semalam peraturan tersebut tidak ditemukan. Padahal, pemerintah DKI biasanya mengunggah

"Yang 25 persen pembayarannya ditunda dan akan dibayarkan ketika APBD stabil."

peraturan gubernur yang telah diterbitkan di situs tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi pengurangan TKD bagi aparat DKI. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini, semua harus siap berkorban untuk menangani Covid-19. Suhaimi meminta agar para amtenar tetap bekerja dan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal meski tunjangan kinerjanya dikurangi. "Jangan menurunkan pelayanan publik," tutur dia. ●